

PASAR CIDU DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2022



ANDI TENRI BATARI DEWAPATI

E041201039



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PASAR CIDU DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

ANDI TENRI BATARI DEWAPATI

E041201039



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PASAR CIDU DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

**ANDI TENRI BATARI DEWAPATI
E041201039**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

pada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI
PASAR CIDU DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI TENRI BATARI DEWAPATI

E041201039

Akan dipertahankan dan dihadapkan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal: 3 bulan mei tahun 2024

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.

NIP. 19651109 199103 1 008

Mengetahui:

Pembimbing Pendamping,

Haryanto, S.IP, M.A.

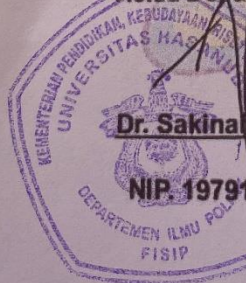
NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik

Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si

NIP. 197912182008122002



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Pasar Cidu Di Kota Makassar Tahun 2022" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Amin Arsyad, M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Haryanto, S.IP., M.A. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Mei 2024
Yang Menyatakan,



ANDI TENRI BATARI DEWAPATI

E041201039

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan skripsi ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku pembimbing utama dan kepada Haryanto, S.IP., M.A. selaku pembimbing pendamping. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Kepada Bunda ANDI BONE WATY dan Tetta MUH RIDWAN TIRO saya mengucapkan limpah terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana serta para dosen Departemen Ilmu Politik.

Akhirnya, penghargaan yang besar juga saya sampaikan atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai kepada :

1. Kepada seluruh informan kbid dinas tata ruang kota makassar, PD pasar, Kepala pasar cidu , masyarakat sekitar di pasar cidu , penjual dipasar cidu, satpol pp kota makassar, tukang parkir di pasar cidu yang telah memberi dan menyisihkan waktu untuk melakukan wawancara terkait data-data yang diperlukan untuk penelitian, serta memberikan kesempatan untuk bertemu.
2. Seluruh teman-teman **Dinamis 2020** yang sudah kuanggap seperti saudara/keluarga sendiri yang telah banyak memberi kebaikan, support kenangan dan cerita yang berwarna, serta banyaknya bantuan dari maba hingga penulisan akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih cinta kasih yang begitu tulus betul-betul saya rasakan selama tiga tahun terakhir, semangat spesial buat Fito, Kardy, Abim, Gope, Jefri, Eki, Opa, Lucky, Dzakhir, Ade, Fadil, Feri, Masita, Umi, Marlina, Awita, Lela, Lidya, Septi, Sabi, Santi, Izza, dan Fani jangan capek nelfon ngajak ngopi tiba-tiba, see u on top gais.
3. Kepada sahabat penulis **NUR FITRI RAMADHANI M** terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan yang tidak henti-hentinya memberikan banyak bantuan doa, motivasi, semangat, waktu, tenaga terima kasih atas support serta banyaknya kebaikan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selama tujuh tahun ini, terima kasih selalu menemani mendengarkan segala keluh kesah penulis selama ini, terima kasih selalu menjadi RUMAH untuk pulang semogaa kita berdua bisa sukses sama-sama yang kuat untuk kita berdua perjalanannya masih panjang semangat i love u.
4. Kepada sahabat penulis yang jauh disana **SYAHADA** terima kasih atas doa, motivasi support serta kebaikan . terima kasih syaa selalu ada kapan pun saya butuhkan, terima kasih juga selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini semangat menjadi ibu dokter yang keren Aamiin.

5. Kepada **“oratarit geng” Tasya , Wide , Ikrar** Terima kasih selalu menjadi rumah untuk pulang bagi penulis dikala senang maupun susah terima kasih telah memberi banyak tawa dan bahagia terima kasih selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis semangat menjadi wanita sukses.
6. Kepada **ANDI MUHAMMAD TRISAKTI** yang sedang berjuang hingga S.TP saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah memberikan banyak motivasi, support serta senantiasa sabar menghadapi saya dan menemani penulis dari awal hingga akhir penulisan terima kasih selalu ada kapan pun saya butuhkan terima kasih telah memberikan banyak kebahagiaan bagi penulis dan pengalaman hidup bagi penulis sehat selalu semoga kebahagiaan menyertai kita berdua semangat bismillah semoga menjadi orang yang sukses dan di lancarkan ,dimudahkan segalanya.
7. Kepada **“miskah” Triza, Fira,Tasya, Zam, Sasa** yang telah bersama dari maba, masa-masa pengkaderan hingga penyusunan akhir skripsi terima kasih tak terhingga saya ucapkan atas bantuan, serta support. War is over gais bismillah on the way baruga.
8. Seluruh Keluarga besar di bone **“ ADIDAS” terutama Puang Mudding, Puang Besse Daca , Puang Ari , Puang Agu** yang selalu menanyakan kabar dan membantu secara materi perihal apapun itu, terima kasih saya ucapkan atas doa serta perhatiannya selama ini.
9. Kepada **“mkshselalu ada” Anggl,Utari,Pute,Atary** terima kasih selalu membersamai selama tujuh tahun ini terima kasih atas support dan doa nya selama ini semoga kita sukses sama-sama dan menjadi wanita-wanita yang keren Aamiin semangat gais.
10. Seluruh **teman-teman KKNT110 Desa Borongloe Bantaeng Melan, Uci, anggi, Alif , Ahmad, Sakty** yang telah memberi banyak pengalaman baru dan **Ibu di Posko, Nunung, Bapak dan Nyau’** terima kasih telah menerima kami dikediamannya selama masa KKN berlangsung we miss u Ibu Desa Nunung, Nyau’ dan Bapak.
11. Kepada **“Amifm” Yayang, Nisa ,Ina , Muthiah, Aghni, Cici** terima kasih telah membersamai dari sd hingga saat ini terima kasih selalu ada dan mendoakan walau dari jauh terima kasih atas dukungannya semoga kita sukses bersama Aamiin.
12. **Kepada diri saya sendiri** terima kasih sudah kuat untuk menjalani kehidupan ini kuat-kuat masih panjang perjalanan saya tau ini berat tapi makasih selalu yakin kalo ini proses untuk menjemput kesuksesan dan membahagiakan kedua orang tua Insya Allah.

Penulis,

ANDI TENRI BATARI DEWAPATI

ABSTRAK

ANDI TENRI BATARI DEWAPATI. **Pasar Cidu Di Kota Makassar Tahun 2022** (dibimbing oleh Armin Arsyad dan Haryanto).

Latar belakang. Keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Cidu Kota Makassar dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran, walaupun di sisi lain banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relatif murah. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mengapa terjadi kemacetan jalan di Pasar Cidu. **Metode.** Dasar penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, Dimana tipe penelitian ini memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Dalam memastikan keabsahan data penelitian kredibilitasnya dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil.** Hasil penelitian ini menunjukkan tiga hal. Pertama, penyempitan jalan raya akibat penggunaan bahu jalan sebagai lahan parkir menimbulkan kemacetan jalan di wilayah Pasar Cidu Kota Makassar akibat tidak adanya lahan parkir resmi sehingga kendaraan di wilayah tersebut menggunakan bahu jalan, tidak adanya penertiban dari pihak Kepolisian dan Satpol PP sehingga premanisme terjadi dan membuka lahan parkir liar serta juru parkir liar untuk menguasai wilayah Pasar Cidu Kota Makassar. Kedua, banyaknya juru parkir liar yang beroperasi tanpa mengantongi izin parkir dan dioperasikan oleh preman-preman di Pasar Cidu Kota Makassar. Ketiga, penataan pedagang kaki lima di Pasar Cidu Kota Makassar yang kurang baik karena tidak adanya data minimum maksimum pedagang kaki lima yang boleh beroperasi serta tidak adanya jalur alternatif bagi pengguna jalan. **Kesimpulan.** Terjadi kemacetan jalan di Pasar Cidu Kota Makassar karena disebabkan oleh tiga faktor yaitu penyempitan jalan raya yang digunakan untuk memarkir kendaraan karena ketiadaan lokasi parkir, maraknya juru parkir liar yang tidak berizin, serta kesemrawutan dalam pengelolaan pedagang kaki lima yang menggunakan area jalan.

Kata Kunci : pasar; pedagang kaki lima; kemacetan; parkir

ABSTRACT

ANDI TENRI BATARI DEWAPATI. **Cidu Market in Makassar City in 2022** (supervised by Armin Arsyad and Haryanto).

Background. The presence of street vendors at Cidu Market, Makassar City, is considered to be disrupting traffic because they are on the side of the road or sidewalk. They are considered the cause of traffic jams and dirt, although on the other hand many people visit them because the prices offered are relatively cheap. **Aims.** This research aims to determine the factors that cause road congestion at Cidu Market. **Method.** The basis of this research is qualitative with a descriptive research type, where this type of research provides a clear picture of the problems being studied based on the experiences experienced by the informants. In ensuring the validity of the research data, its credibility is done using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results.** The results of this research show three things. Firstly, the narrowing of the highway due to the use of the road shoulder as a parking area has caused road congestion in the Pasar Cidu area of Makassar City due to the absence of official parking so that vehicles in the area use the road shoulder, there is no control from the Police and Satpol PP so that thuggery occurs and opens illegal parking lots and illegal parking attendants to control the Cidu Market area, Makassar City. Second, there are many illegal parkers who operate without a parking permit and are operated by thugs at Cidu Market, Makassar City. Third, the arrangement of street vendors in Cidu Market, Makassar City is not good because there is no data on the minimum maximum for street vendors who are allowed to operate and there are no alternative routes for road users. **Conclusion.** Road congestion occurs at Pasar Cidu, Makassar City, caused by three factors, namely the narrowing of the main road used for parking vehicles due to the lack of parking, the rise of illegal parking attendants without permits, and chaos in the management of street vendors who use the road area.

Keywords: market; street vendors; congestion; parking

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	8
2.2. Pedagang Kaki Lima	12
2.3. Kemacetan Lalu Lintas	17
2.4. Manajemen Lalu Lintas	18
2.5. Volume Lalu Lintas.....	18
2.6. Kerangka Berpikir.....	21
2.7. Kerangka Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Lokasi Penelitian	23
3.2. Tipe dan Jenis Penelitian	23
3.3. Jenis dan Sumber Data	23
3.4. Teknik Pengumpulan data	24
3.5. Informasi Penelitian.....	25
3.6. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1. Gambaran Umum Kota Makassar.....	26
4.2. Sejarah Pasar Cidu	29

4.3. Struktur Organisasi Pasar Cidu.....	31
4.4. Juru Parkir Liar Pasar Cidu Kota Makassar.....	32
4.5. Petugas Satpol PP Pasar Cidu Kota Makassar	32
4.6. Terjadinya Penyempitan Jalan Raya Akibat Penggunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir	34
4.7. Terciptanya Tukang Parkir Liar Dan Tidak Terorganisir.....	37
4.8. Terjadinya Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Cidu Kota Makassar Yang Kurang Baik.....	41
BAB V PENUTUP	48
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota Makassar	28
Gambar 2. Wilayah Pasar Cidu Dalam Peta <i>Google Maps</i>	29
Gambar 3. Struktur Pengurus Pasar Cidu Kota Makassar	31
Gambar 4. JPL di Pasar Cidu Kota Makassar	32
Gambar 5. Satpol PP Ketika Sedang Melakukan Penertiban di Pasar Cidu...	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk dalam satu wilayah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan juga menjadi target pembangunan. Pengambilan kebijakan di suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, serta kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Penduduk suatu wilayah didefinisikan sebagai orang yang biasa (sehari-hari) tinggal di wilayah itu. Cara ini disebut juga menggunakan konsep usual residence.

Persebaran penduduk, konsentrasi penduduk di setiap, permukaan bumi tidaklah sama. Manusia hidup tersebar di setiap penjuru dunia secara tidak merata. Bahkan di setiap negara dari hasil sensus yang dilakukan, setelah dipetakan tampak bahwa tempat tinggal penduduk tersebar secara tidak merata. Tugas geografi kemudian adalah melakukan analisis mengapa persebaran itu tidak merata, membandingkan karakteristik geografis wilayah yang padat dan yang jarang penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia sendiri berdasarkan hasil SP2010 adalah sebesar 237.641.326 jiwa. Jika dibandingkan dengan sensus penduduk terdahulu maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan.¹

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat di perkotaan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan lapangan kerja. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan, kebutuhan akan penciptaan lapangan kerja semakin mendesak. Tren ini menyoroti pentingnya mengembangkan strategi untuk mengatasi peningkatan populasi dan dampaknya terhadap pasar kerja. Penting bagi pembuat kebijakan dan perencana kota untuk berkolaborasi dalam inisiatif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha untuk berkembang, kota dapat secara efektif memenuhi permintaan populasi yang terus bertambah dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Kota Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, Kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan yang terbesar di luar Pulau Jawa setelah Kota Medan. Dari segi perekonomian, kota Makassar masih menjadi kutub pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, perannya terhadap pertumbuhan

¹ Bps.go.id, *Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi*, diperoleh dari <https://www.bps.go.id/indicator/12/141/1/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>, diakses pada tanggal 20 September 2023.

ekonomi Sulawesi Selatan mencapai 6,63% sebagaimana yang di ungkapkan oleh kepala bidang neraca wilayah dan analisis statistik yaitu Didik Nursetyohadi saat merilis pertumbuhan Sulawesi Selatan, di kantor BPS Sulsel. Pencapaian tersebut merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan visi Kota Makassar, yaitu Makassar sebagai kota dunia.² Di Kota Makassar hampir di setiap trotoar jalan, kita dapat menjumpai pedagang kaki lima yang menjual barang ataupun makanan yang dijual. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan tempat wisata. Ada juga yang menggunakan lapak dengan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya.

Ada beberapa komunitas pedagang kaki lima di kota Makassar, salah satunya adalah komunitas pedagang kaki lima Pasar Cidu. Sesuai dengan namanya komunitas ini beraktifitas di sepanjang Kawasan Tabaringan, tepatnya di Kecamatan ujung tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Komunitas pedagang kaki lima ini sudah berjualan di kawasan Pasar Cidu sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan jumlah mereka terus bertambah setiap tahunnya, mereka menempati emperan-emperan toko di sepanjang Pasar Cidu, jenis dagangannya bermacam-macam. Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima cukup membantu mengatasi masalah pengangguran di kota Makassar dan sebagai salah satu sumber pemasukan PAD bagi pemerintah kota Makassar, tetapi di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan.

Kebijakan publik terhadap pedagang kaki lima merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Pedagang kaki lima adalah bagian integral dari perekonomian lokal dan perlu diberikan perlindungan serta dukungan yang cukup. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa kegiatan pedagang kaki lima berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan adanya kebijakan publik yang baik, diharapkan pedagang kaki lima dapat beroperasi dengan aman dan nyaman serta memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan ekonomi daerah.

Dukungan pemerintah terhadap pedagang kaki lima yang terorganisir sangat penting dalam menjaga pertumbuhan perekonomian informal. Dengan menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang memadai bagi para pedagang kaki lima ini, pemerintah dapat membantu memastikan bisnis mereka beroperasi dengan lancar dan efisien. Dukungan ini juga dapat membantu meningkatkan tampilan jalanan secara keseluruhan dan meningkatkan pengalaman berbelanja

² Koran Makassar, *Kawasan Pasar Cidu Makassar Selain Macet, Tarif Parkir Juga Mahal*, diperoleh dari <https://koranmakassar.com/kawasan-pasar-cidu-makassar-selain-macet-tarif-parkir-juga-mahal/>, diakses pada tanggal 20 September 2023.

bagi pelanggan. Selain itu, dengan bekerja sama secara erat dengan para pedagang kaki lima, pemerintah dapat mengatasi segala kekhawatiran atau permasalahan yang mungkin mereka hadapi, sehingga pada akhirnya membina hubungan yang lebih harmonis antara para pedagang dan pihak berwenang. Secara keseluruhan, dukungan pemerintah terhadap pedagang kaki lima yang terorganisir merupakan komponen penting agar lingkungan perkotaan berfungsi dengan baik.

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan hal yang penting karena memainkan peran vital dalam dunia usaha menengah ke bawah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang. Banyak orang memilih menjadi pedagang kaki lima, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; sempitnya lapangan pekerjaan, kesulitan perekonomian, urbanisasi. Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa orang memilih pekerjaan menjadi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal yang lain. Di lain sisi, keberadaan pedagang kaki lima juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun di sisi lain pedagang kaki lima banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relatif murah, sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Satpol PP (operasi pengrusakan) dalam menangani pedagang kaki lima yang melanggar peraturan.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. penjelasan Peraturan Daerah No.44 Tahun 2002 pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima tidak boleh menempati trotoar atau badan jalan, Kemudian dalam Peraturan daerah ini juga ditetapkan sejumlah jalan raya besar yang sama

sekali tidak boleh ditempati untuk berdagang oleh pedagang kaki lima atau wilayah bersih bebas dari pedagang kaki lima.

Perkembangan PKL menghadapkan pemerintah Kota Makassar pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan di lain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota Makassar. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehinggaterjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian lingkungan kota sering kali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan.

Kebijakan pasar dan pedagang kaki lima merupakan aspek penting dalam tata kelola kota. Kebijakan yang ditujukan untuk mengelola pedagang kaki lima memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan menjamin persaingan yang sehat di pasar. Dengan menerapkan peraturan yang efektif, pembuat kebijakan dapat mencapai keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi hak-hak pedagang kaki lima. Penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap pedagang kaki lima dan masyarakat luas. Melalui peraturan yang bijaksana dan disusun dengan baik, pihak berwenang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya pedagang kaki lima dengan tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik.

Kebijakan terhadap PKL merupakan persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan seimbang. Meskipun penting untuk memastikan keselamatan dan ketertiban umum, penting juga untuk mempertimbangkan mata pencaharian para pedagang tersebut. Pemerintah harus berupaya menerapkan kebijakan yang memberikan solusi adil dan berkelanjutan baik bagi pedagang maupun masyarakat. Dengan bekerja sama secara erat dengan para pemangku kepentingan dan melakukan penilaian menyeluruh, kami dapat mengembangkan rencana komprehensif yang memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Transparansi dan akuntabilitas penegakan peraturan perlu dijunjung tinggi untuk membangun kepercayaan dan kerja sama di antara seluruh pemangku kepentingan.

Permasalahan kemacetan lalu lintas akibat PKL merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan pertimbangan kebijakan yang matang. Meskipun pedagang kaki lima memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, kehadiran mereka juga dapat berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas dan bahaya keselamatan di jalan. Penting bagi para pembuat kebijakan untuk mencapai keseimbangan antara mendukung mata pencaharian para pedagang kaki lima dan memastikan kelancaran arus lalu lintas di daerah perkotaan. Menerapkan zona penjualan yang ditentukan, meningkatkan pilihan transportasi umum, dan

menegakkan peraturan ketat terhadap aktivitas pedagang kaki lima adalah beberapa solusi potensial yang dapat membantu mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, perencana kota, dan masyarakat lokal sangat penting dalam mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Hal ini kemudian yang menjadi tantangan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam rangka memberikan solusi sebagai wujud pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya, tujuannya demi mengatasi permasalahan kemacetan jalan di Pasar Cidu Kota Makassar. Dari uraian latar belakang masalah di atas, tidak bisa di pandang sebagai permasalahan yang mudah untuk di selesaikan, walau dengan Solusi atas pengujian teori-teori yang mempuni. Semangat ini yang harus diperkuat dengan peran pemangku kekuasaan yang diberikan hak dan kewajiban dalam mengatasi kemacetan jalan di sekitaran Kawasan wilayah pasar cidu kota makassar. Lebih lanjut penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk nantinya mampu memberikan sebuah karya ilmiah yang telah diuji kebenarannya sebagai bahan literasi dalam wilayah akademik, serta sebagai bahan pertimbangan pemerintah kota makassar dalam memberikan Solusi atas kemacetan jalan di Pasar Cidu Kota Makassar.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan judul, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah, yakni mengapa terjadi kemacetan jalan di Pasar Cidu?. Hal ini tentunya membutuhkan penelitian yang mendalam agar permasalahan yang ada khususnya kemacetan jalan di Pasar Cidu dapat terungkap, serta dapat diuraikan untuk nantinya diberikan suatu konsep yang membangun dalam hal penanganannya.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mengapa terjadi kemacetan jalan di Pasar Cidu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Menjadi rujukan literatur bagi pemerintah dalam mengatasi Penyempitatan Jalan Raya Akibat Penggunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir, perlu ketegasan pihak-pihak terkait seperti Kepala Pasar Cidu Kota Makassar,

Kepolisian Kota Makassar, Satpoll PP Kota Makassar, Tata Ruang Kota Makassar, serta Kepala Pasar-Pasar Kota Makassar.

- b. Menjadi rujukan literatur bagi peneliti yang akan datang dalam studi tentang pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya Pasar Cidu oleh Pemerintah Kota Makassar.
- c. Memperkaya khazanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan terkait Pemerintah Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam membuat pola-pola pembinaan dalam membina pedagang kaki lima, khususnya Pasar Cidu demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menikmati fasilitas umum.
- b. Bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai pentingnya peran Pemerintah Kota Makassar dalam membina pedagang kaki lima di Kota Makassar, khususnya Pasar Cidu.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kota makassar dalam penertiban premanisme oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar yang lebih serius untuk menangkap preman preman serta jaringannya di pasar cidu, untuk nantinya bekerjasama dengan pihak Pemda, Pemkot, Satpol PP, serta Dishub.
- d. Sebagai bahan masukan ilmiah bagi pihak pemerintah Kota Makassar dalam pembuatan jalur alternatif bagi pengguna jalan yang tidak ingin berbelanja di Kawasan Pasar Cidu Kota Makassar.
- e. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli banyak digunakan untuk lebih menyempurnakan penelitian Pasar Cidu Kota Makassar Tahun 2022. Berkaitan dengan hal itu, maka pembahasan pada bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu, konsep serta teori dan kerangka berpikir yang membantu memahami isi penelitian.

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Akbar T yang berjudul kapasitas pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di kota makassar (studi kasus program “kalimanta”),³ yang bertujuan untuk melihat kapasitas pemerintah kota makassar dalam menata pedagang kaki lima (studi kasus program “kakilimata”). Penulis menggunakan konsep kualitatif dalam menganalisis data dalam penataan pedagang kaki lima di kota makassar yang mana bertitik fokus pada program kakilimata oleh pemerintah kota makassar. Penelitian ini sejatinya berbeda dengan penelitian penulis, hal ini dilihat bahwa penulis memperkecil lingkup penelitian hanya pada wilayah Pasar Cidu, sehingga harapannya pengambilan data dan pengelolaannya dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Paisyal Hafidzi (2019) yang berjudul implementasi kebijakan pemerintah kota pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan teratai kelurahan padang bulan kecamatan senapelan,⁴ yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan teratai kelurahan padang bulan kecamatan senapelan, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh satuan polisi pamung praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan teratai kelurahan padang bulan kecamatan senapelan. Dalam penulisan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan penelitian penulis, hal ini disebabkan oleh lokasi penelitian serta instansi penelitian yang jauh berbeda dengan penelitian penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Frenky L. Allorerung yang berjudul penertiban pedagang kaki lima di pasar makale kabupaten tanah toraja, yang bertujuan untuk menganalisis Apakah pengelolaan pasar sudah sesuai dengan peraturan Bupati Tana Toraja no. 36 tahun 2017 sebagai upaya penertiban pedagang kaki lima di pasar Makale, serta Bagaimanakah prosedur dalam

³ M. Ali Akbar T, *kapasitas pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di kota makassar (studi kasus program “kalimantan”)*, Makassar, UIM, 2018.

⁴ Mhd. Paisyal Hafidzi, *Berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan*, Pekanbaru, UIR, 2019.

perekrutan pengelola pasar pada Dinas perdagangan dan Perindustrian. Dalam penulisan tersebut diatas tidak dapat dipersamakan dengan penelitian penulis hal ini disebabkan oleh lokasi penelitian serta instansi penelitian yang jauh berbeda dengan penelitian penulis.

Dari ketiga penelitian yang relevan dengan penelitian ini, posisi penulis ada pada untuk memperkuat penelitian yang telah ada sebelumnya, dimana kasus-kasus kemacetan yang ditimbulkan oleh pasar, utamanya di perkotaan disebabkan karena penataan pasar yang tidak baik dan kurangnya lahan parkir. Penulis berupaya untuk menggali dan mencari tahu faktor-faktor penyebab kemacetan di Pasar Cidu Kota Makassar.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Leslie A. Pal dalam Widodo (2010:12) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah "*as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems*".⁵ Thomas R. Dye dalam Subarsono (2009:2) mengatakan bahwa "*kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (publik policy is what ever government choose to do or not to do)*". Subarsono (2009:2) mengartikan kebijakan menurut Thomas R. Dye tersebut bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.⁶

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah "*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.⁷

Menurut George Edward III, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

⁵ Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

⁶ A.G., Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁷ Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang

bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi "terbuka", yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

2.3. Pedagang Kaki Lima

Istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari masa kolonial Belanda. Tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa (1811-1816). Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang dinamakan trotoar. Trotoar ini memiliki lebar 5 feet way (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di Chinatown.⁸ Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu sering dimanfaatkan untuk tempat berjualan. Kata 5 feet sering disalah artikan ke dalam bahasa Melayu yakni Kaki Lima karena penerjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Melayu menggunakan hukum Diterangkan Menerangkan. Dari istilah trotoar kaki lima inilah pedagang yang berjualan di wilayah tersebut sering dijuluki dengan nama Pedagang Kaki Lima.⁹

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara "etimologi" atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan

⁸ Dikutip dari <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 1 April 2024 pukul 11:20

⁹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini!*, Yudhistira, Bogor, 2007, hlm. 2

dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.¹⁰

Istilah ini menjalar ke Medan, kemudian dari Medan terus menjalar sampai ke Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar yang tadinya berfungsi sebagai jalur pedestrian atau pejalan kaki sering disalahgunakan oleh pedagang untuk tempat berjualan atau sekedar untuk tempat beristirahat meletakkan gerobak dagangan mereka. Sehingga masyarakat Indonesia menyebutnya dengan Pedagang Kaki Lima.

Menurut Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun, pada akhir abad ke-19 jumlah PKL di Batavia suka berteriak untuk menarik pembeli. Tapi pemerintah pada saat itu tidak menyukai kehadiran mereka. Menurut salah satu bumiputera yang duduk di Dewan Kota yaitu Abdoel Moeis menyatakan bahwa pedagang kaki lima itu diusir karena banyak orang Belanda yang mau melihat adanya pedagang kaki lima yang kotor di kawasan tersebut.¹¹ Jumlah Pedagang Kaki Lima terus meningkat pasca kemerdekaan. Bahkan pada dekade 1950-an, Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta. Sehingga DPKS mengupayakan pemindahan para Pedagang Kaki Lima ke tempat yang lebih memadai untuk berdagang, namun upaya itu gagal karena kota kekurangan lahan untuk pasar. Pada tahun 1960-an, citra Pedagang Kaki Lima makin buruk. Beberapa alasannya adalah Pedagang Kaki Lima dianggap merusak keindahan kota, cara dagangannya primitif dan membuat malu negara apabila ada tamu asing yang berkunjung. Tetapi sebagian kalangan membela pedagang kaki lima tersebut, salah satunya Mayapada. Mayapada berpendapat bahwa sebagian pedagang-pedagang baru mampu berjualan dengan cara berkaki lima.

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak sekali kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utama beralihnya kegiatan ekonomi dari sektor formal ke sektor informal adalah sifat dari sektor informal yang tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi, modal usaha yang besar, dan sarana yang sederhana sehingga mudah dijangkau oleh

¹⁰ Dikutip dari https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 11 Maret 2024 pukul 14:33

¹¹ Dikutip dari <https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv> diakses pada tanggal 1 April 2024 pukul 15:33

semua lapisan masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap. Menurut Jayadinata (1999:46) karakteristik sektor informal antara lain:¹²

- a. Bentuknya tidak terorganisir
- b. Kebanyakan kerja sendiri
- c. Cara kerja tidak teratur
- d. Biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi

Terutama sejak terjadinya krisis moneter yang menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia tidak bisa menutupi biaya operasionalnya lagi sehingga harus ditutup. Hal ini menyebabkan terjadinya Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Sehingga angka pengangguran di Indonesia saat itu meningkat dengan pesat. Salah satu kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima. Kesulitan untuk mencari pekerjaan serta keterbatasan kemampuan modal untuk mendirikan usaha bagi masyarakat golongan ekonomi lemah mendorong mereka untuk melakukan suatu usaha dalam mempertahankan hidupnya. Untuk mempertahankan hidupnya mereka mencari nafkah yang sesuai dengan kekuatan serta kemampuan yang dimilikinya yang serba terbatas. Wujud keterbatasan ini adalah keterbatasan tingkat pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi atau keterbatasan modal, keterbatasan tentang pengetahuan dalam tatanan atau peraturan yang berlaku, membuat mereka para masyarakat ekonomi lemah untuk berusaha dalam bentuk usaha dagangan berupa pedagang kaki lima (PKL) yang mereka laksanakan di kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹³

Sehingga menurut Handoko Tanuwijaya faktor penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁴

- a. Sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia memaksa mereka memilih menjadi Pedagang Kaki Lima. Selain itu untuk menjadi Pedagang Kaki Lima tidak dibutuhkan modal yang besar ataupun pendidikan yang tinggi,

¹² Muhammad Yunus, Auliya Insani, "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)", Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol.

¹³ Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhan-dan-perkembangan-te.pdf> diakses pada tanggal 1 April 2024 pukul. 12.01

¹⁴ Handoko Tanuwijaya, Bisnis Pedagang Kaki Lima, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan sektor formal seperti pada instansi-instansi pemerintahan atau perusahaan tertentu.

- b. Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal sehingga terjadi Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sehingga memaksa mereka beralih ke sektor informal.
- c. Peluang, selain faktor sempitnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi pada tahun 1998, kemunculan pedagang kaki lima karena dipicu peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan.
- d. tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri namun menghasilkan untung yang lumayan besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif juga menjadi alasan untuk mereka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menjadi pedagang kaki lima..
- e. Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota tidak sepenuhnya berpendapatan tinggi, melainkan sebagian berpendapatan menengah atau bahkan rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang relatif murah meningkat.

Pedagang Kaki Lima umumnya menempati tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai sebuah keuntungan, misalnya pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat-tempat yang berpotensi menjadi objek wisata. Pedagang kaki lima terutama di daerah tujuan pariwisata sangat bersentuhan dengan pengunjung ataupun masyarakat pada umumnya. Karena pedagang kaki lima lebih mudah untuk dijumpai dibanding dengan pedagang resmi yang berjualan di tempat yang tetap. Hal ini memudahkan wisatawan ataupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berupa barang-barang ecer. Dengan demikian peran pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat tempat yang cukup penting.

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi

pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan. Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut¹⁵

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri;
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil;
- c. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran;
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil;
- e. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah;
- f. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu;
- g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah;
- h. Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha "family enterprise", artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut;
- i. Mempunyai sifat "one man enterprise", yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang;
- j. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang;
- k. Sebagian Pedagang Kaki Lima melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah;
- l. Pedagang Kaki Lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus;
- m. Anggapan bahwa para Pedagang Kaki Lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam Masyarakat;
- n. Pedagang Kaki Lima tidak memiliki jam kerja yang tetap;
- o. Pedagang Kaki Lima memiliki jiwa "entrepreneurship" yang tinggi.

¹⁵ Alisjahbana, 2006, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya, ITS press, hlm. 43

2.4. Kemacetan Lalu Lintas

Transportasi mempunyai fungsi yang sangat strategis yaitu sebagai fasilitas penunjang dan pendorong pembangunan. Sasaran utamanya adalah meningkatkan kelancaran arus lalu lintas angkutan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Kelancaran transportasi berarti mampu mengatasi hambatan, kepadatan dan kemacetan lalu lintas angkutan. Kemacetan lalu lintas, terutama yang terjadi di daerah perkotaan merupakan peristiwa yang umum dialami, yang menimbulkan dampak negatif (eksternalitas negatif). Kemacetan lalu lintas tidak mungkin dielakan dalam setiap hari kerja di kota-kota besar. Eksternalitas negatif lainnya adalah pencemaran (polusi) udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor.

Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas adalah terdapatnya persimpangan jalan. Pada umumnya, kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor di daerah perkotaan disebabkan karena jumlah kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Kendaraan bermobil penumpang (sedan dan mikrolet) meningkat dengan laju pertumbuhan sekitar 15 persen per tahun, sepeda motor bertambah sekitar 30 %, sedangkan pembangunan prasarana jalan baru di daerah perkotaan boleh dikatakan tingkat pertumbuhannya sangat rendah, atau tidak mengalami penambahan. Kemacetan yang terjadi di kota-kota besar merupakan hal biasa, kemacetan merupakan pemandangan yang tak mungkin terhindari pada setiap hari kerja. Disamping kemacetan yang menjemukan, polusi udara yang menyesakan dan panasnya udara yang melelahkan, tak terhindarkan pula, habisnya bahan bakar yang sia-sia. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas adalah persimpangan jalan, disamping penyebab-penyebab seperti tidak tertibnya pemakai jalan dan lain sebagainya.

Solusi yang dapat menyelesaikan kemacetan yang disebabkan oleh persimpangan jalan, yaitu pertama, mengatur waktu nyala lampu lalu lintas (traffic light) secara proposional dengan jumlah kendaraan yang ada. Kedua, mengubah dan mengatur jalur yang dapat berjalan bersamaan, yaitu memberi kesempatan kepada kendaraan yang akan belok kiri (keep left), yang dikombinasikan dengan solusi pertama. Solusi ketiga, yaitu mengubah jalur yang sudah ada dan mengkombinasikan dengan solusi kedua, sebelum kendaraan sampai pada persimpangan jalan (perempatan atau pertigaan) disediakan jalur jalan yang memotong ke arah belok ke kiri. Solusi keempat, adalah kombinasi beberapa solusi, yaitu solusi pertama dengan kedua, atau solusi kedua dengan ketiga.

2.5. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Traffic management (manajemen lalu lintas) atau sering kali pula disebut traffic engineering, yaitu dimaksudkan sebagai usaha untuk mengatur dengan sebaik mungkin penggunaan jalan raya di daerah perkotaan disesuaikan dengan tingkat dan volume lalu lintasnya. Bila kongesti lalu lintas dapat diatasi, maka berarti arus lalu lintas dapat diperlancar.¹⁶ Hal ini dapat diusahakan tidak perlu harus membangun jalan raya baru, akan tetapi dapat dilaksanakan dengan menetapkan pengaturan yang tepat dan efektif.¹⁷

Manajemen lalu lintas akan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, baik saat ini maupun di masa mendatang, dengan mengefisienkan pergerakan orang/kendaraan dan mengidentifikasi perbaikan-perbaikan yang diperlukan di bidang teknik lalu lintas, angkutan umum, perundang-undangan, road pricing dan operasional dari sistem transportasi yang ada. Tidak termasuk didalamnya pembangunan fasilitas transportasi baru dan perubahan – perubahan besar dari fasilitas yang ada.¹⁸

Tujuan pokok manajemen lalu lintas adalah memaksimalkan pemakaian sistem jalan yang ada dengan meningkatkan keamanan jalan, tanpa merusak kualitas lingkungan. Manajemen lalu lintas dapat menangani perubahan-perubahan pada tata letak geometri, pembuatan petunjuk-petunjuk tambahan dan alat-alat pengaturan seperti rambu-rambu, tanda-tanda jalan untuk pejalan kaki, penyebrangan dan lampu untuk penerangan jalan.

2.6. Volume Lalu Lintas

Ditinjau dari klasifikasi fungsi jalan sebagai Jalan arteri primer menghubungkan antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau PKN dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).¹⁹ Dengan demikian jalan ini sangat berperan penting dalam melayani dan melewatkan arus lalu lintas yang cukup besar. Namun kenyataannya pada jalan ini sering terjadi kepadatan jumlah kendaraan yang di

¹⁶ Manopo, C. *Competency Based Talent and Performance Management System*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. (2011). Hlm. 18.

¹⁷ Adisasmita, *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis*, graha ilmu, Yogyakarta, 2011. Hlm. 24.

¹⁸ Ahmad Munawar. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Yogyakarta : Penerbit Beta Offset. 2004. Hlm. 56.

¹⁹ Hitapriya Suprayitno, Ria Asih Aryani Soemitro, *Refleksi Awal Prinsip Dasar Manajemen Asset Infrastruktur*, Jurnal Manajemen Asset Infrastruktur & Fasilitas, Vol. 2 No. 1 2018.

tambah dengan hambatan samping seperti in-out kendaraan, kendaraan henti, pejalan kaki maupun parking on street. Pentingnya peranan ruas Jalan Tlogosari Raya mengakibatkan terjadinya akumulasi beban arus lalu lintas, antara lain terjadinya penumpukan kendaraan, tundaan lalu lintas dan antrian kendaraan, terjadi tundaan waktu perjalanan (delay), serta menurunnya tingkat pelayanan jalan.

Analisis Lalu Lintas Jalan Perkotaan Dengan MKJI 1997 Jalan adalah sebagai salah satu prasarana perhubungan darat yang mempunyai fungsi dasar yakni memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas. Pergerakan arus manusia, kendaraan dan barang mengakibatkan berbagai interaksi baik interaksi antara pekerja dengan tempat bekerja, interaksi antara pedagang dengan masyarakat (konsumen) dan lain sebagainya. Segmen jalan perkotaan /semi perkotaan mempunyai perkembangan secara permanen dan menerus sepanjang atau hampir seluruh jalan, minimum pada satu sisi jalan, apakah berupa perkembangan lahan atau bukan. Jalan di atau dekat pusat perkotaan dengan penduduk padat.²⁰

Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumberdaya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada, merupakan persoalan utama di banyak negara. Lalu lintas sebagai bagian dari Sistem Transportasi Nasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena lalu lintas yang diatur dengan baik akan menjadi pendorong terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi. Permasalahan yang umum ditemukan dalam lalu lintas baik di kota-kota besar maupun daerah berkembang lainnya adalah masalah kemacetan yang diakibatkan oleh pengaturan lalu lintas yang tidak tepat ditambah infrastruktur jalan yang tidak memadai menambah parahnya kemacetan.

Kemacetan adalah kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati 0 km/jam atau bahkan menjadi 0 km/jam sehingga mengakibatkan terjadinya antrian. Suatu ruas jalan atau segmen jalan tertentu memiliki kapasitas yang tidak selalu sama begitu juga dengan volume arus yang melaluinya. Pengaruh tujuan pergerakan dari kendaraan dan orang sangat mempengaruhi tingkat kepadatan dari suatu ruas jalan mengakibatkan terciptanya kondisi bahwa tidak sepanjang waktu arus padat. Pengaturan arah lalu

²⁰ Freddy Jansen dkk, *Mnimalisasi Kesalahan Survey Topografi Dalam Pemetaan Digital Dengan Global Menggunakan Autocad Land Destop Dan Geographic Information System*, Jurnal Sipil Statik, Vol. 7 No. 1 Januari 2019.

lintas yang selama ini dilakukan tidak mempertimbangkan besar arus kendaraan, sementara pertumbuhan kendaraan tidak dapat dikendalikan. Arus terus berfluktuasi berdasarkan kebutuhan pengguna jalan, misalnya pada pagi hari arus cenderung lebih padat dibanding dengan malam hari. Arah pergerakan juga dapat mempengaruhi kepadatan, misalnya pada sore hari arus yang menuju ke dalam kota cenderung lebih sepi dibanding dengan arus yang keluar kota. Penggunaan sumber daya petugas lalu lintas dalam jumlah yang besar tentu bukan merupakan solusi yang efisien untuk melakukan pengaturan lalu lintas semenyang efisien untuk melakukan pengaturan lalu lintas sementara anggaran yang besar dan waktu yang lama. Dengan mendistribusikan arus kendaraan berdasarkan kapasitas secara maksimum maka flow kendaraan bisa dikendalikan sehingga kemacetan bisa diurai.

Hambatan samping yang dimaksud adalah pejalan kaki, kendaraan parkir/berhenti, kendaraan keluar/masuk dan kendaraan lambat. Faktor hambatan samping yang paling besar menyebabkan kemacetan adalah yang faktor disebabkan oleh parkir kendaraan dan kendaraan keluar masuk. Banyak aktivitas samping jalan di Indonesia sering menimbulkan konflik, Pengaruh hambatan samping terutama berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan apalagi pada daerah jalan perkotaan. Analisis faktor-faktor penyebab kemacetan lalu lintas di telah menjadi topik utama yang selalu menjadi masalah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum kemacetan lalu lintas di sebabkan oleh ketidak seimbangan antara peningkatan kepemilikan kendaraan dan prasarana jalan yang tersedia serta kapasitas efektif ruas jalan yang ada lebih kecil dari kapasitas jalan yang di rencanakan akibat adanya hambatan di tepi jalan. Hambatan di tepi jalan tersebut sering kali terkait dengan adanya aktivitas sosial dan ekonomi, yaitu adanya parkir di badan jalan yang di karenakan terdapat pertokoan yang tidak menyediakan tempat parkir. Sarana angkutan umum yang menurunkan penumpang di sembarang tempat serta, lalu lalangnya orang untuk menyebrang yang menyebabkan kapasitas jalan mengalami penurunan. Dengan kondisi yang demikian, dapat di pastikan akan terjadi kepadatan kendaraan yang berlebihan pada ruas jalan di setiap klasifikasinya.

Pengaruh hambatan samping tersebut terjadi pula pada ruas jalan yang penuh akan penduduk. Sehingga seharusnya ruas jalan yang di butuhkan harus sesuai dengan ruas yang ada tanpa terganggu oleh hambatan samping. Seperti yang kita ketahui bahwa jalan tersebut memang sudah terjadi pelebaran jalan namun pelebaran jalan tidak menyeluruh hanya sebagian ruas saja, kenyataanya seperti yang sudah kita lihat bahwa di jalan tersebut tidak mengalami perubahan seperti halnya kemacetan lalu lintas yang selalu terjadi di jalan yang disebabkan oleh banyaknya hambatan samping di jalan tersebut. Sehingga tingkat hambatan

samping justru membuat ruas jalan yang di gunakan menjadi tidak maksimal dengan keadaan jalan yang tidak mengalami perkembangan atau tetap. Hambatansamping yang tertinggi yang berada di sepanjang ruas jalan tersebut terjadi di titik titik tertentu yang melewati beberapa kawasan perekonomian memang memiliki tingkat hambatan samping yang cukup tinggi sehingga kita harus memiliki solusi sebagai peningkatan kinerja lalu lintas di daerah tersebut.

2.7. Kerangka Berpikir

Pasar tradisional memiliki banyak keunggulan dan kepentingan yang penting bagi masyarakat dan ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pasar tradisional masih memiliki nilai dan kepentingan yang signifikan seperti, Mempertahankan Budaya Lokal. Pasar tradisional seringkali menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial di masyarakat lokal. Mereka mencerminkan budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat setempat dalam hal berbelanja, berinteraksi sosial, dan mempertahankan warisan budaya. Mendukung Perekonomian Lokal, pasar tradisional merupakan sumber pendapatan bagi banyak pedagang kecil dan pelaku usaha lokal. Mereka memberikan kesempatan bagi produsen lokal, petani, dan pengrajin untuk menjual barang-barang mereka langsung kepada konsumen, sehingga mendukung ekonomi lokal. Akses Kepada Produk Segar dan Berkualitas, pasar tradisional seringkali menjadi tempat di mana produk-produk segar dan berkualitas tersedia dengan harga yang terjangkau. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh bahan makanan dan barang-barang lainnya yang segar dan berkualitas tinggi. Menjaga Keterlibatan Sosial, pasar tradisional juga memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga keterlibatan sosial di antara masyarakat. Mereka memberikan tempat bagi orang-orang untuk bertemu, berbicara, dan berbagi informasi, serta memperkuat ikatan sosial antarwarga. Mendorong Keberlanjutan, dalam banyak kasus, pasar tradisional lebih berkelanjutan secara ekologis karena mereka cenderung menggunakan metode produksi dan distribusi yang lebih ramah lingkungan. Mereka juga dapat membantu dalam mempromosikan praktik pertanian lokal dan penggunaan produk lokal, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan lingkungan. Memberikan Pilihan yang Beragam, pasar tradisional sering menawarkan beragam produk dan barang, termasuk produk-produk lokal, unik, dan sulit ditemui di tempat lain. Ini memberikan konsumen pilihan yang lebih banyak dan memungkinkan mereka untuk menjelajahi dan menemukan barang-barang yang berbeda-beda. Menjaga Keberlanjutan Kehidupan Pedagang Kecil, pasar tradisional memberikan peluang bagi pedagang kecil untuk berpartisipasi dalam ekonomi tanpa harus bersaing dengan rantai ritel besar. Ini penting untuk menjaga keragaman ekonomi dan mencegah dominasi oleh perusahaan besar yang dapat mengancam kelangsungan hidup bisnis kecil.

Karena alasan-alasan ini, pasar tradisional tetap memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat, serta dalam pelestarian budaya lokal dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan mendukung keberadaan serta perkembangan pasar tradisional di tengah dinamika pasar modern yang terus berkembang.

Akan tetapi di sisi lain keberadaan pasar tradisional menjadi persoalan tersendiri di beberapa Kawasan perkotaan, seperti yang terjadi di pasar cidu kota makassar. Permasalahan ini diakibatkan atas 3 (tiga) factor utama yakni(1). Terjadinya Penyempitan Jalan Raya Akibat Penggunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir. (2). Terciptanya Tukang Parkir Liar Dan Tidak Terorganisir. (3). Terjadinya Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Cidu Kota Makassar Yang Kurang Baik. Dari uraian permasalahan tersebut di atas diharapkan bahwa terwujudnya menejemen lalu lintas yang ideal dalam penertiban lalu lintas di sekitar wilayah pasar cidu kota makassar. Apabila digambarkan dalam bentuk skema penelitian kiranya akan seperti gambaran pada sub bab kerangka penelitian dibawah ini.

2.8. Kerangka Penelitian

Jika digambarkan skema penelitian penulis ini kiranya akan seperti gambar dibawah ini:

